GUBERNUR SULAWESI TENGAH

SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA ACARA SOSIALISASI PROGRAM PENYULUH ANTIKORUPSI KEPADA CALON PESERTA SERTIFIKASI KAMIS, 8 MEI 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WAR. WAB.
SALAM SEJAHTERA, SYALOM,
OM SWASTI ASTU NAMO BUDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN,

YANG SAYA HORMATI,

- INSPEKTUR INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH BESERTA JAJARANNYA;
- INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH;

- PLT. KEPALA BPSDMD PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- TIM LSP KPK RI;
- CALON MASTER ASESOR KOMPETENSI (CMA) BNSP RI;
- KOORDINATOR WIDYAISWARA DAN PARA WIDYAISWARA BPSDMD PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- PEJABAT ADMINISTRATOR, PENGAWAS, FUNGSIONAL SDM APARATUR, FUNGSIONAL BANGKOM DAN PELAKSANA LINGKUP BPSDMD PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- PARA PESERTA SOSIALISASI, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA;

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA KARENA ATAS IZIN-NYA JUALAH, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DI DITEMPAT INI DALAM SUASANA PENUH KEBAHAGIAAN, UNTUK BERSAMA-SAMA MENGIKUTI

SOSIALISASI PROGRAM PENYULUH ANTIKORUPSI KEPADA CALON PESERTA SERTIFIKASI. DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SELANJUTNYA, MARILAH KITA TETAP BERSHALAWAT DAN BERTASLIM KEPADA JUNJUNGAN NABIYULLAH MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN INSYA ALLAH KITA SEMUA PARA PENGIKUTNYA YANG SETIA HINGGA AKHIR ZAMAN NANTI. AMIN YA ROBBAL'ALAMIN..

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK DAPAT HANYA DILAKUKAN MELALUI UPAYA PENINDAKAN, TETAPI JUGA UPAYA PENCEGAHAN MELALUI PERBAIKAN SISTEM SERTA PEMBANGUNAN PERILAKU DAN BUDAYA ANTIKORUPSI. HAL INI SEJALAN

DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. DIMANA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENCEGAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 HURUF A, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERWENANG UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SETIAP JEJARING PENDIDIKAN, MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SOSIALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, MELAKUKAN KAMPANYE ANTI KORUPSI KEPADA MASYARAKAT.

SEMENTARA ITU, INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DI INDONESIA DAPAT DILIHAT DARI 3 SURVEI, YAITU:

1. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) YANG DIKELUARKAN OLEH KPK SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN PENCEGAHAN KORUPSI PADA SISTEM PEMERINTAHAN,
2. INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK),
3. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) YANG DIKELUARKAN OLEH BPS SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BUDAYA ANTIKORUPSI DI MASYARAKAT.

PROGRAM SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI INI, SANGAT SELARAS DENGAN ARAHAN PRESIDEN RI PADA SAAT PEMBUKAAN AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (ANPK) TAHUN 2020 PADA 26 AGUSTUS 2020 DI GEDUNG KPK JAKARTA, PRESIDEN MENYAMPAIKAN 3 (TIGA) AGENDA

BESAR DALAM AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA, YAITU : (1) PEMBENAHAN REGULASI NASIONAL; (2) REFORMASI BIROKRASI; DAN (3) PENINGKATAN KAMPANYE LITERASI ANTIKORUPSI DI TENGAH MASYARAKAT.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERUS BERUPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS. UPAYA INI MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MENCIPTAKAN APARATUR YANG HANDAL, PROFESIONAL, SERTA BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI. DENGAN MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN INTEGRITAS APARATUR

SIPIL NEGARA, DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK DAN TRANSPARAN. PENGEMBANGAN SDM YANG TERENCANA DAN SISTEMATIS MENJADI KUNCI UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT, SEHINGGA MAMPU MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT AKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN RESPONSIF.

UNTUK MEWUJUDKAN PERAN PENGEMBANGAN SDM SECARA OPTIMAL, DIPERLUKAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI YANG BAIK ANTARA BPSDM DAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN. KERJASAMA INI MENCAKUP PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN, TERMASUK UJI KOMPETENSI YANG HARUS DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI BAIK DI TINGKAT PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA.

DENGAN DEMIKIAN, APARATUR SIPIL NEGARA DAPAT BERSINERGI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SECARA EFEKTIF, SERTA MEMILIKI KESAMAAN DALAM PENGANGGARAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN SDM. MELALUI LANGKAH-LANGKAH KOLABORATIF INI, DIHARAPKAN SULAWESI TENGAH DAPAT MEMILIKI APARATUR PEMERINTAHAN YANG TIDAK HANYA KOMPETEN, TETAPI JUGA MEMILIKI MORALITAS YANG TINGGI DALAM MENJALANKAN AMANAH PUBLIK.

OLEHNYA, SAYA BERHARAP KEGIATAN INI DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA KEDEPAN SULAWESI TENGAH MAMPU MEMENUHI STANDAR INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG

DITETAPKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. UPAYA KOLABORATIF ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN BERBAGAI PIHAK TERKAIT SANGAT PENTING UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. SAYA YAKIN SULAWESI TENGAH DAPAT MENJADI CONTOH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DAN MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN DAERAH.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MEMBIMBING DAN MERIDHOI KITA SEMUA DALAM UPAYA MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL

DALAM MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH YANG MAJU, BESAR DAN BERKELANJUTAN.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN "BISMILLAHRRAHMANIRRAHIM" SOSIALISASI PROGRAM PENYULUH ANTIKORUPSI KEPADA CALON PESERTA SERTIFIKASI, DENGAN INI SAYA NYATAKAN DI MULAI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WALLAHU MUSTA'AN,
WASSALAMU' ALLAIKUM WAR, WAB,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DR. H. ANWAR HAFID, M.SI